



Accountability Brief

Pengarah:

Inosentius Samsul

(Kepala Badan Keahlian DPR RI)

Penanggung Jawab:

Djustiawan Widjaja

(Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara)

Tim Penulis:

Sukmalalana

Yunita Romauli Nababan

Tri Purwita Sari

Upaya Pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melalui Vaksinasi Hewan Ternak Di Indonesia

Isu Strategis

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) atau yang secara global dikenal dengan *Foot and Mouth Disease* (FMD) adalah penyakit sangat menular pada hewan akibat infeksi virus penyakit mulut dan kuku. Pada umumnya PMK menyerang hewan berkuku genap/belah baik hewan ternak maupun hewan liar seperti babi, kambing, kerbau, sapi, gajah dan rusa. Penyebaran PMK dapat terjadi melalui kontak langsung dengan hewan yang terjangkit maupun tidak langsung seperti dari pakan atau peralatan yang terkontaminasi virus, maupun melalui udara, dalam hal ini penyebaran PMK melalui udara dapat terjadi hingga radius 10 KM. Selanjutnya hewan yang terpapar PMK akan menunjukkan gejala berupa produksi air liur yang berlebihan, terbentuk lepuh berisi cairan atau luka pada lidah, gusi, hidung dan kuku, nafsu makan menurun bahkan hilang, dan hewan tidak mampu berjalan atau pincang.

Indonesia sendiri telah menyatakan bebas PMK sejak tahun 1986 melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 260/Kpts/TN.510/5/1986. Hal tersebut juga mendapat pengakuan dari Badan Kesehatan Hewan Dunia atau *Office International des Epizooties* (OIE) di tahun 1990 yang tercantum dalam resolusi OIE Nomor XI tahun 1990. Namun PMK kembali masuk dan menyebar di Indonesia pada Mei 2022. Adapun daerah yang pertama kali melaporkan kasus PMK antara lain Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo dan Mojokerto.

Meskipun PMK tidak menyebar kepada manusia, penyebaran PMK yang sangat cepat dan dampak negatif yang ditimbulkan menyebabkan PMK berpotensi menjadi ancaman yang nyata bagi peternakan dan ketahanan pangan di Indonesia. Dampak negatif PMK terhadap hewan ternak antara lain penurunan produksi susu pada sapi perah, keguguran, infertilitas, penurunan berat badan bahkan kematian mendadak. Hal tersebut menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi para peternak dan juga negara. Berdasarkan data dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK, estimasi kerugian ekonomi akibat PMK mencapai 38,67 Triliun/tahun. Oleh karena itu pencegahan PMK harus dilaksanakan dengan serius dengan harapan Indonesia akan segera kembali bebas PMK.

Permasalahan

Berdasarkan data *Crisis-Center* PMK yang bekerja sama dengan Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (ISIKHNAS) Kementerian Pertanian Republik Indonesia, hingga 30 Desember 2022 terdapat 587.435 ekor ternak yang terjangkit PMK. Berdasarkan data

2022

Komisi IV



tersebut sebanyak 545.016 ekor berhasil disembuhkan melalui pengobatan, vaksinasi dan biosekuriti, sementara sebanyak 10.594 ekor mati, 14.026 ekor dilakukan potong bersyarat dan sisanya sebanyak 17.886 terdata belum sembuh. Data perkembangan kasus PMK dan jenis hewan ternak yang terjangkit PMK digambarkan dalam diagram berikut:

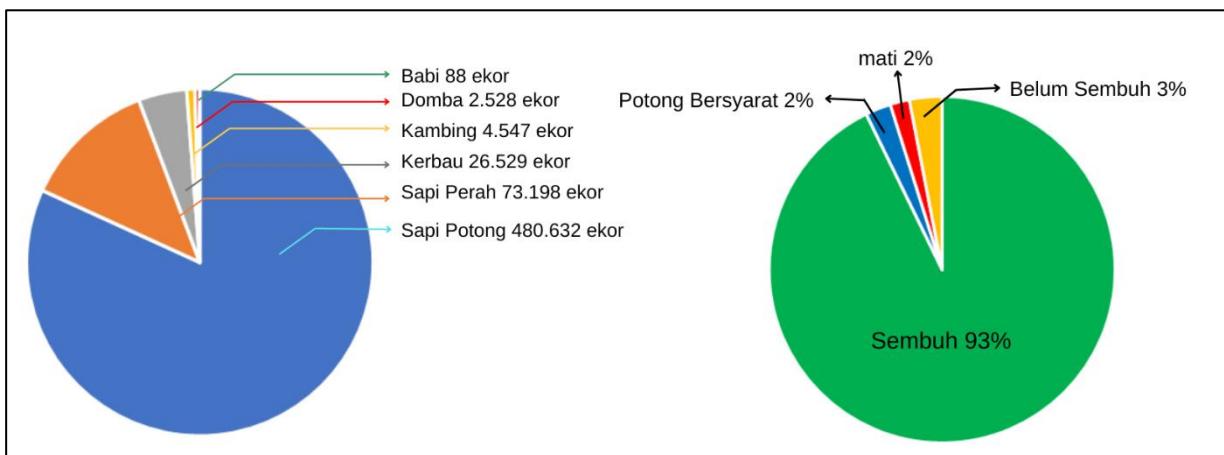


Diagram Perkembangan Kasus PMK dan Jenis Hewan Ternak yang Terjangkit PMK
sumber : Crisis-Center PMK (diolah)

Tingginya tingkat kesembuhan hewan yang terjangkit PMK wajib diapresiasi, hal ini memperlihatkan adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah khususnya Kementerian pertanian untuk memerangi PMK di Indonesia. Namun masih adanya kasus aktif PMK di beberapa wilayah perlu diwaspadai dan ditangani dengan cermat agar tidak menyebabkan lonjakan kasus di masa yang akan datang. Salah satu pencegahan PMK yang dinilai cukup efektif adalah vaksinasi terhadap hewan ternak yang rentan terhadap PMK. Hasil monitoring Balai Besar Veteriner Wates, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa vaksinasi efektif meningkatkan kekebalan tubuh ternak sehingga mampu mengurangi keparahan dari PMK dan mencegah terjadinya infeksi.

Terkait vaksinasi PMK, hingga akhir Desember 2022 tingkat realisasi vaksin telah mencapai 9.305.695 dosis atau 68,93% dari total vaksin yang didistribusikan sebanyak 13.500.585 dosis. Vaksin ini diberikan pada hewan ternak rentan PMK dengan prioritas sapi dan kerbau. Namun dalam pelaksanaannya Satgas Penanganan PMK melaporkan terdapat permasalahan terkait vaksinasi yakni kebijakan vaksinasi, pengadaan dan distribusi vaksin. Selain itu disebutkan juga permasalahan terkait kekurangan tenaga vaksinator di tingkat daerah, kekurangan bahan habis pakai seperti jarum suntik dan eartag dan fasilitas penyimpanan vaksin berupa *cold storage*. Hal-hal tersebut perlu untuk segera ditindaklanjuti untuk mendorong percepatan vaksinasi PMK di seluruh Indonesia.

Rekomendasi

Dalam rangka mewujudkan kembali Indonesia bebas PMK, Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian khususnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) untuk mempercepat vaksinasi hewan ternak diseluruh wilayah Indonesia melalui:

- a. Distribusi vaksin ke seluruh wilayah Indonesia terutama ke daerah lumbung ternak, dalam hal ini perlu dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan vaksin berupa *cold storage*, bahan habis pakai untuk vaksin seperti jarum suntik dan eartag sebagai tanda hewan telah divaksin;
- b. Mencukupi kebutuhan dokter hewan dan/atau vaksinator untuk melakukan vaksinasi di tingkat daerah;
- c. Mendorong vaksinasi dosis satu dan dua terhadap semua hewan ternak yang rentan PMK sehingga terbentuk *herd immunity* pada hewan ternak dan menekan penyebaran PMK antar hewan ternak mengingat saat ini baru diprioritaskan terhadap sapi dan kerbau;

- d. Memperhatikan ketersediaan pasokan vaksin dan mendorong produksi vaksin di dalam negeri melalui pemberian izin kepada perusahaan dalam negeri untuk memproduksi vaksin PMK.

Referensi

Kementerian Pertanian. (n.d.). *Informasi Penanggulangan dan Tindakan Pencegahan Wabah PMK*. Retrieved from Crisis Center PMK: <https://crisiscenterpmk.ditjenpkh.pertanian.go.id/>

Umatin, C., Putri, Y. A., Inayatus, N., & Pertiwi, R. A. (2022). Sosialisasi Pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku sebagai Upaya Menjaga Stabilitas Ekonomi Masyarakat. *Journal of Empowerment*.